

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula/Keterangan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau	Kesimpulan profesional pemeriksa mengenai tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Riau	Kriteria yang harus dipenuhi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau : 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Kecukupan Sistem Pengendalian Internal 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – Undangan 4. Kecukupan pengungkapan pada Catatan Laporan Keuangan	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Aset Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian RAPBD Kab/Kota dengan Peraturan yang lebih tinggi dan dokumen perencanaan	Kesesuaian diukur berdasarkan sejauh mana APBD mematuhi dokumen – dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi	Jumlah Rekomendasi Evaluasi APBD Kabupaten/Kota yang dtindaklanjuti Jumlah Rekomendasi Evaluasi APBD Kabupaten/ Kota x 100	Bidang Anggaran Daerah

Pekanbaru, 3 Maret 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**



INDRA, SE, M.Si, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19721115 199803 1 004